

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>1</sup>

Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.”<sup>2</sup>

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), 203.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167-168.

produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

## 2. Asas Pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan *Groze* akta.
- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir*. Ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

<sup>4</sup> Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

### 3. Macam-Macam Putusan

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.<sup>5</sup>

#### a. Dilihat dari segi sifatnya:

- 1) Putusan *declaratoir* : yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan *constitutif* : yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.
- 3) Putusan *condemnatoir* : yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

#### b. Dilihat dari segi isinya:

- 1) *Niet Onvankelijk Verklaart (N.O.)* : maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu :
  - a) Gugatan tidak berdasarkan hukum.
  - b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.
  - c) Gugatan kabur (*obscur libel*).
  - d) Gugatan masih prematur.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 297-299.

- e) Gugatan Nebis in idem.
  - f) Gugatan error in persona.
  - g) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa).
  - h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.
- 2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.
- 3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- 5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- 6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak

pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.

- 7) Gugatan dihentikan (*aan hanging*) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat dari segi jenisnya :

- 1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Putusan Preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan Interlocutoir : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- b) Putusan Insidentil : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.

- 2) Putusan Provisi : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- 3) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

#### **4. Bentuk dan Isi Putusan Hakim**

Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: bagian kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara; Identitas pihak-pihak; Duduk perkaranya (bagian posita); Tentang pertimbangan hukum; Dasar hukum; Diktum atau amar putusan; Bagian kaki putusan; dan Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.<sup>6</sup>

#### **5. Kekuatan Putusan Hakim**

Putusan yang telah *incracht* atau telah berkekuatan hukum tetap memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.<sup>7</sup> Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan.

---

<sup>6</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*...., 204

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*..... 309-310

Kekuatan Pembuktian (sejak putusan *Incracht*), artinya putusan Hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengajukan alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak putusan *incracht*, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara.

Argumen PK dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan *incracht* adalah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *incracht* tidak ada lagi, kecuali jika dilakukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya dengan alasan-alasan yang sangat tertentu.

## **6. Tinjauan tentang Pertimbangan Putusan Hakim**

### **a. Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim**

Pertimbangan putusan hakim adalah suatu tahapan proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap sejak awal hingga akhir persidangan perkara berlangsung. Dalam pertimbangan hukum tersebut

dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Kewajiban itu juga harus dipahami dalam pengertian yang luas, yaitu dengan tidak hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan saja, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat luas.

Adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suatu pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 20 November 2018.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), V, 140.



## **b. Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim**

Peradilan Agama yang dalam hal ini adalah Hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*). Selain itu suatu hal yang perlu disadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Tetapi juga merupakan bentuk penyiksaan bagi pihak yang kalah dan dirugikan, sehingga putusan hakim tersebut tidak berbeda dengan putusan yang telah ditetapkan Tuhan atau *judicium dei*.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur (*fairtrial*) dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral (*moral justice*), dan bukan hanya semata-mata berdasarkan keadilan undang-undang (*legal justice*).

Pertimbangan putusan hakim sangat berpengaruh pada hasil akhir suatu putusan dan tentunya akan berdampak pada status hukum dan hubungan para pihak yang berperkara. Apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka: (1) siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya; (2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan harus dilaksanakan baik secara

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 871.

sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Dengan demikian pertimbangan hakim dalam memutus perkara sangatlah penting. Sehingga hakim harus berhati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan pertimbangan hukum. Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar serta azas-azas yang dijadikan landasan dalam pertimbangan hukumnya, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan nilai keadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

Selain itu, hakim dalam mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara yang ditanganinya harus mampu melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) serta harus memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 229 KHI dan dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.

### **c. Proses Pertimbangan Putusan Hakim**

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, wajib untuk:<sup>11</sup>

- 1) Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang diuraikan dalam duduk perkara dan Berita Acara Persidangan.
- 2) Mengkualifisir peristiwa/ fakta yang telah terbukti itu, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa, atau yang mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan.

#### **d. Bahan Pertimbangan Putusan Hakim**

Demi mewujudkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, maka hakim dalam pertimbangan putusannya harus memenuhi dua hal pokok, yaitu :

##### **1) Pertimbangan Fakta**

Untuk memperoleh pertimbangan fakta, maka hakim dalam pemeriksaan suatu perkara harus memperhatikan duduk perkara atau

---

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.....*, 32.

peristiwa yang menjadi sengketa para pihak. Dalam pemeriksaan ini hakim juga memerlukan adanya pembuktian dan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan. Hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>12</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dali yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 141

dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>13</sup>

## 2) Pertimbangan Hukum

Dalam mempertimbangkan hukum, pada dasarnya kerja profesional hakim bertumpu pada kreativitas hakim dalam menginterpretasi undang-undang dan melakukan metode penemuan hukum lainnya. Oleh karena itu setiap hakim peradilan agama harus piawai dan berani melakukan *judicial activism*. Kompetensi *judicial activism* tersebut meliputi serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendorong hakim untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.<sup>14</sup>

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam :

- a) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis.
- b) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis.
- c) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.....*, 142

<sup>14</sup> Muhammad Noor. 2013. *Penemuan Hukum dalam Teori, Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang*, Majalah Peradilan Agama Edisi 2 September-November 2013, 5

perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

- d) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa.

Hakim dalam upaya menemukan, menentukan dan menjatuhkan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi.

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, dengan cara masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>15</sup>

Berikut bentuk dan jenis penemuan hukum dengan metode interpretasi dan konstruksi :

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 167

## 1) Penemuan hukum dengan metode interpretasi

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a) Metode penafsiran substantif

Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.

### b) Metode penafsiran gramatikal

Metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain. Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.

### c) Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai satu kesatuan yang

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata .....*, 279

utuh, tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari suatu sistem.

d) Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktek Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum.<sup>17</sup>

e) Metode penafsiran sosiologis atau teleologis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Disini hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang, disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

f) Metode penafsiran komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 179



g) Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h) Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Seperti perkataan menjual dalam Pasal 1576 KUH Perdata, ditafsirkan bukan hanya jual beli semata-mata, tetapi juga “peralihan hak”.

i) Metode penafsiran futuristis

Interpretasi futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

2) Penemuan hukum dengan metode konstruksi

Menurut LB Curzon sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali, SH, MH., mengatakan bahwa interpretasi dan konstruksi mempunyai arti yang berbeda, interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu undang-undang, sedangkan konstruksi mengandung arti pemecahan atau menguraikan makna ganda,

kekaburan dan ketidakpastian dari perundang-undangan sehingga tidak bisa dipakai dalam peristiwa konkrit yang diadilinya.<sup>18</sup>

Para hakim dalam melakukan konstruksi dalam penemuan dan pemecahan masalah hukum harus mengetahui tiga syarat utama yaitu:

- a) Konstruksi harus mampu melihat semua bidang hukum positif yang bersangkutan
- b) Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya.
- c) Konstruksi kiranya mengandung faktor keindahan dalam arti tidak dibuat-buat, tetapi dengan dilakukan konstruksi persoalan yang belum jelas dalam peraturan itu diharapkan muncul kejelasan. Konstruksi harus dapat memberikan gambaran yang jelas tentang suatu hal, oleh karena itu harus cukup sederhana dan tidak menimbulkan masalah baru dan boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan tujuan dari konstruksi adalah agar putusan hakim dalam peristiwa konkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan bermanfaat bagi pencari keadilan.<sup>19</sup>

Dalam praktik Peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*..., 192

<sup>19</sup> *Ibid*

### 1. Argumen peranalogian

Konstruksi ini juga disebut dengan “analoji” yang dalam hukum Islam dikenal dengan “qiyas”. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>20</sup>

### 2. Metode argumentum a’contratio

Achmad Ali mengemukakan bahwa metode ini menggunakan penalaran yaitu apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, argumentum a’contrario titik beratnya diletakkan pada ketidakpastian peristiwanya.<sup>22</sup> Tujuan argumentum a’contrario ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan undang-undang.

### 3. Pengkonkretan hukum (*Rechtsverviijnings*)

Konstruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum dan ada pengkonkretan hukum. Agar dapat dipergunakan dalam menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, masalah hukum yang sangat luas

---

<sup>20</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata....*, 282

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.....*, 197

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia....*, 69

itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga dapat diterapkan dalam suatu perkara secara konkrit.

#### 4. Fiksi Hukum

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.<sup>23</sup> Adapun fungsi dari fiksi hukum ini di samping untuk memenuhi hasrat untuk menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang.

### **B. Tinjauan tentang Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan**

Putusan hakim yang baik menurut Mukti Arto, hendaknya memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan Kepastian Hukum, Rasa Keadilan, Manfaat bagi para pihak dan masyarakat.<sup>24</sup> Ketiga unsur tersebut merupakan asas penting yang menjadi tolak ukur hakim dalam mencapai tujuan hukum yang dituangkan dalam suatu putusan.

Untuk menegakkan hukum, ketiga hal tersebut haruslah mendapat perhatian secara profesional, meskipun dalam praktiknya sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas yang menjadi dasar dan tujuan hukum. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1992) 136

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata.....*, 35.

keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.<sup>25</sup> Adapun penjelasan terkait ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Kepastian Hukum

Prof.Mr.J.Van Kan memaparkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. E. Utrecht juga menyatakan hal yang sama bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepentingan hukum dalam pergaulan manusia.<sup>26</sup>

Kepastian hukum dalam masyarakat sangatlah penting, karena dengan adanya kepastian hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Akan tetapi, jika hakim terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dengan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akan berakibat pada ketidakadilan bagi masyarakat dan menunjukkan kesan hukum yang kaku.

Dalam penerapan kepastian hukum, apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Apabila peraturan tersebut dilaksanakan secara ketat, maka Undang-undang yang berlaku sering terasa kejam bagi masyarakat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.<sup>27</sup>

Asas kepastian hukum ini dianut oleh aliran Normatif/Yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivis. Menurut aliran ini, walaupun

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara.....* 166-168

<sup>26</sup> Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Penelitian (Malang:FH-UMM, 2017), 11

<sup>27</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),14

aturan hukum atau penerapan hukum tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.<sup>28</sup>

Pemahaman lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kepastian dari hukum dan kepastian yang diadakan/diciptakan oleh karena hukum. Kepastian hukum adalah kepastian yang diperoleh karena setiap pelanggaran hukum pasti diberi sanksi. Selain itu peraturan-peraturan hukum dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum dilaksanakan sesuai isi peraturan-peraturan hukum tersebut.

Kepastian hukum jenis ini dapat tercapai apabila : 1) Sebanyak mungkin peraturan hukum berbentuk Undang-Undang; 2) dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan; 3) Undang-Undang tersebut merupakan hukum yang adil; 4) dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (multitafsir). Sedangkan kepastian hukum yang diadakan/diciptakan oleh karena adanya hukum adalah kepastian hukum yang diperoleh karena adanya suatu peraturan hukum tertentu.<sup>29</sup>

Disisi lain, kepastian hukum menurut Fence M. Wantu dirumuskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah .....*, 17

<sup>30</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, September 2012, 483

- a. Melakukan solusi autotorif, yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas dengan cara memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi, artinya proses perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim tersebut.
- d. Mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa tertib dan rasa aman dalam masyarakat.
- e. Mengandung equality, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.

## 2. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>31</sup> Tujuan hukum berupa keadilan merupakan sesuatu yang wujudnya abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan.

Teori tentang keadilan ini dianut oleh aliran etis yang menganggap keadilan sebagai ajaran *moral idea* atau ajaran moral teoritis. Ajaran etis menyatakan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.<sup>32</sup> Menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak

---

<sup>31</sup> Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), 7

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* ....., 88

adil bagi masyarakat. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Plato, Justinianus, dan Eugen Erlich.

Mengenai konsep keadilan ini, Plato dan Aristoteles memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai keadilan. Plato membagi konsep keadilan yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral adalah perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. Sedangkan keadilan prosedural adalah apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.<sup>33</sup>

Aristoteles membedakan konsep keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengutamakan pembagian keseimbangan sesuai haknya masing-masing menurut jasanya. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>34</sup>

Menurut Fence M. Wantu, kriteria tujuan hukum berupa keadilan terdiri dari:<sup>35</sup>

- a. Mengandung solusi autoritatif, yaitu memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak.
- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana dengan biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan.

---

<sup>33</sup> Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah .....*,17

<sup>34</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 12

<sup>35</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No 3, September 2012, 485.



- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- e. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

### 3. Kemanfaatan

Konsep asas kemanfaatan dalam putusan hakim adalah apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual atau mengejar kepastian hukum atau keadilan belaka, akan tetapi juga harus mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dikatakan demikian, karena hukum itu ada untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, justru akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

Konsep ini dianut oleh aliran utilitis yang memasukkan ajaran moral praktis dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang bagi warga masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut aliran ini yaitu Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bahkan Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 161

Menurut Fence M. Wantu, terpenuhinya tujuan hukum berupa kemanfaatan yaitu: apabila telah memberikan kepuasan atau kebahagiaan bagi para pihak yang berperkara; telah teratasinya konflik diantara para pihak; normalnya hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa; diperolehnya kembali apa yang menjadi objek sengketa oleh pihak yang dinyatakan menang; dan telah menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>37</sup>

Ketiga sudut pandang mengenai asas-asas tersebut pada intinya memiliki persamaan dengan nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya, Radbuch mengajarkan apabila terjadi pertentangan diantara ketiga asas tersebut, maka digunakanlah asas prioritas dari ketiga asas/ tujuan hukum tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, penggunaan asas prioritas secara kasuistis harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan secara berimbang dan proporsional, mengikuti asas prioritas kasuistis atau yang sesuai dengan kasus yang dihadapi.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No 3, September 2012, 486.

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum....*, 96

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 132

## C. Tinjauan tentang Itsbat Nikah

### 1. Pengertian Itsbat Nikah

Secara bahasa, Itsbat Nikah berasal dari dua rangkaian kata bahasa Arab yaitu *Itsbat* / أثبت-يثبت-إثباتا yang artinya adalah pengakuan, penetapan, pengiyaan.<sup>40</sup> Sedangkan kata nikah berasal dari kata النكاح dan الزواج yang secara bahasa mempunyai arti الوطئ (setubuh,senggama) dan الضم (berkumpul).<sup>41</sup>

Secara istilah, terdapat perbedaan pendapat mengenai makna nikah menurut para ulama ahli fiqh. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.<sup>42</sup> Sedangkan nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat Nikah adalah suatu penetapan, keabsahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Pengesahan pengakuan nikah tersebut dibutuhkan bagi pasangan suami istri yang telah lama melangsungkan perkawinan secara *sirri* dan membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan tersebut diperlukan pernyataan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *I'anatut thalibin* :

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 1990), 339

<sup>41</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1

<sup>42</sup> *Ibid*, 2

وفي الدعوى بنكاح على امرأة بذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عادلين

Pemaparan kitab diatas menjelaskan bahwa dalam pengakuan nikah seorang perempuan, harus dikemukakan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, yaitu wali, dan persaksian oleh dua orang saksi yang adil.<sup>43</sup> Adanya permohonan Itsbat Nikah ini dikarenakan tidak adanya bukti perkawinan secara sah dan perlindungan hukum yang kaitannya dengan pencatatan nikah.

Jadi, yang dimaksud dengan Itsbat Nikah adalah suatu penetapan untuk pengesahan atas perkawinan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sah, yang sudah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang diatur dalam agama Islam, akan tetapi belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah selaku Pejabat Kantor Urusan Agama.

## 2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Dalam syari'at Islam baik al-Qur'an maupun al sunnah tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan dan Itsbat Nikah, akan tetapi suatu akad perjanjian harus dicatatkan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَالْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ..

Ayat tersebut merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman yang apabila hendak melakukan pencatatan dalam setiap *muamalah* hendaknya harus dicatatkan dengan cara yang benar.

---

<sup>43</sup> Shaltut Abu Bakar bin Muhammad, *I'anatut Thalibin*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 42

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, berbagai problematika masyarakat dan pertimbangan kemaslahatan umat, maka hukum Indonesia mengatur tentang adanya pencatatan perkawinan. Perkembangan hukum mengenai pencatatan perkawinan ini tentunya tidak pernah lepas dari kontribusi pemikiran para ulama Islam karena di dalam metode dikenal dengan berbagai metode *istinbath* hukum seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan lain-lain. Maka suatu pencatatan perkawinan termasuk Itsbat Nikah sangat diharuskan dalam Islam seperti yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفسد على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan”.<sup>44</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum. Karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan status hukum, hak-hak suami isteri serta kemaslahatan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>45</sup>

---

62 <sup>44</sup> Jalaluddin Abd al-Rahman, *Al-Asbah Wa al- Nadhair*, (Bandung, Dar al-Ihya', 1996),

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Perkawinan*, 131

Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>46</sup> Sedangkan dasar hukum Itsbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 2, 4, 5, 6 dan 7.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama, Pelaksanaan UU Perkawinan*, 158

sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 menyebutkan (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Pasal 6 merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan atau Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Adapun ayat (4) menjelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.<sup>47</sup>

### 3. Syarat-syarat Itsbat Nikah

Mengenai syarat terkait Itsbat Nikah ini tidak dijelaskan secara khusus dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Itsbat Nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat dan rukun pernikahan. Rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan rukun mengikuti Fiqh Imam Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Ketentuan yang harus dilengkapi dalam rukun nikah secara lengkap adalah : a) harus ada calon mempelai laki-laki; b) calon mempelai perempuan; c) Wali Nikah dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan; d) Dua orang saksi dan; e) *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.<sup>48</sup>

Adanya analogi syarat Itsbat Nikah dengan rukun nikah tersebut dilakukan karena Itsbat Nikah pada dasarnya merupakan suatu penetapan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkup Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam*, 319

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 61



Syari'at Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah. Maka, untuk memperoleh penetapan berupa pengesahan nikah tersebut, para pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu mengajukan perkara permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

#### **4. Prosedur Itsbat Nikah**

Sejatinya perkara Itsbat Nikah merupakan bentuk perkara permohonan (volunter) yang diajukan oleh kedua suami-isteri yang diajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di tempat tinggal pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Permohonan tersebut kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121 ayat (4) HIR/ Pasal 144 Rbg).

Perkara permohonan ini harus diputus oleh hakim dalam bentuk penetapan. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum. Aturan pengesahan nikah/Itsbat Nikah ini, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Dalam praktiknya dimasyarakat, Itsbat Nikah tidak hanya dilakukan untuk mengesahkan perkawinan saja, tetapi ada juga yang mengisbatkan untuk perceraian. Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu kesatuan dalam putusan perceraian.

Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka pengadilan agama/mahkamah syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan Itsbat Nikah. Adapun pedoman khusus dalam beracara di pengadilan agama terkait proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara pengesahan perkawinan atau Itsbat Nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Permohonan Itsbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan Itsbat Nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan Itsbat Nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI , *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013,143-146

- 3) Proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan perempuan yang lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan Itsbat Nikah diajukan

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Jika permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan ke Pengadilan Agama/ Mahkamah syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan Itsbat Nikah.

9) Orang lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan intervensi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara Itsbat Nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah penerimaan PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-

kurangnya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan agama/mahkamah syar'iyah,

12) Majelis hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, majelis hakim segera menetapkan hari sidang.

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut :

a) Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal..... di.....”.

#### **D. Tinjauan tentang Poligami**

##### **1. Pengertian Poligami**

Pengertian Poligami menurut Dahlan sebagaimana dikutip oleh Hariyanti bahwa poligami pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* atau *poly* yang berarti banyak, dan *gamos* atau *gamain* yang berarti perkawinan. Maka selanjutnya poligami dapat dimaknai suatu perkawinan dimana seorang laki-laki yang melakukan perkawinan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>50</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebut kata Poligami, namun bermakna yang sama dengan adanya aturan mengenai beristri lebih dari satu orang yang terbatas sampai empat orang.

##### **2. Dasar Hukum Poligami**

Dalam syari'at Islam, kebolehan berpoligami diatur dalam al Qur'an Surat an Nisa' ayat 3, yaitu seorang laki-laki diperbolehkan untuk berpoligami

---

<sup>50</sup> Hariyanti, *Konsep Poligami dalam Hukum Islam*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008, 106

dengan menikahi dua, tiga, empat orang wanita dengan syarat harus mampu berlaku adil. Jika ia tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah beristeri seorang wanita saja. sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an Surat an Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن

خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا (3)

Ayat diatas merupakan satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan pembenaran dibolehkannya poligami. Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang suami takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana menikahinya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lain yang ia sukai, baik dua, tiga, atau empat. Kemudian apabila seorang suami tersebut takut tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah ia menikahi seorang perempuan saja atau budak yang ia miliki, karena yang sedemikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Tihami, Islam membolehkan laki-laki tertentu dalam melaksanakan poligami sebagai jalur alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai terjerumus dalam perzinahan dan hal lain yang secara jelas diharamkan agama.<sup>51</sup>

Sedangkan Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidaklah memuat peraturan mengenai poligami, karena hal tersebut telah

---

<sup>51</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358

dikenal dan dipraktekkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum adanya Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya digunakan sebagai jalan alternatif disaat sangat darurat yang boleh dilakukan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>52</sup>

Quraish Shihab kembali menegaskan bahwa syarat wajib berlaku adil atau keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya orang yang melakukan poligami dilarang memperturukan suasana hatinya dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintainya.<sup>53</sup>

Selain dalil al Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 diatas, Rasulullah juga memberi ancaman bagi pelaku poligami sebagaimana sabdanya yang artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda : "Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring."*<sup>54</sup>

Hadits tersebut menjelaskan bahwa hanya Nabi yang mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sedangkan para pengikutnya tidak. Maka, bagi para suami yang akan berpoligami hendaknya harus benar-benar mempertimbangkan niat, syarat dan segala konsekuensinya tersebut. Karena dalam berpoligami seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tidak boleh mengabaikan hak-haknya atau bahkan mendiskriminasi

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 200

<sup>53</sup> *Ibid*, 201

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Subnan Ibnu Majah*, (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Shahih Sunan Ibnu Majah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221

isteri-isteri yang lain. Jika syarat dan hal-hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka Nabi memberi ancaman bagi para suami yang berpoligami bahwa kelak di hari kiamat nanti ia (suami) akan mendapati dirinya dengan bentuk yang miring atas azab dari Allah SWT.

### 3. **Syarat-syarat dan Alasan Poligami**

Ketentuan mengenai syarat poligami selain diatur dalam al-Qur'an dan Hadits, juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat pokok yang harus dipenuhi apabila seorang suami akan berpoligami atau beristeri lebih dari satu orang adalah : (1) terbatas hanya sampai empat istri; (2) syarat utama, harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya; (3) apabila tidak mampu berlaku adil, maka suami dilarang berpoligami. Sedangkan ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam memberi syarat bagi suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, jika izin tersebut tidak dilakukan, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Khoirudin Nasution merangkum alasan-alasan diperbolehkannya poligami yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 UU Perkawinan, Pasal 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai dua jenis syarat poligami, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif yang dimaksud adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.



Sedangkan syarat kumulatif adalah ada persetujuan tertulis dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Kecuali isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama minimal dua tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan, maka persetujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlukan.<sup>55</sup>

#### 4. **Prosedur Izin Poligami**

Agar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :<sup>56</sup>

- 1) Permohonan poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukkan sebagai termohon.
- 2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut tidak dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memberi izin poligami.

---

<sup>55</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAAdemia+TAZAFFA, 2009), 267-268

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 201, 135-137

- 3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberikan izin poligami jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- 4) Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi terlebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) dibawah ini.
- 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua, jika suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.
- 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

- 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut : “Untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri keempat, istri ketiga, istri kedua dan istri pertama”.
- 8) Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/istri dari hadiah/warisan.
- 9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama.
- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, sebagaimana yang dimaksud dalam angka (9) diatas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Adapun seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin mengajukan poligami, maka wajib baginya memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat/atasannya, dan bagi PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri yang kedua/ ketiga/ keempat. Peraturan Pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain seorang suami harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, masih ada ketentuan yang khusus yaitu PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990.<sup>57</sup>

Prosedur khusus mengenai izin perkawinan PNS untuk berpoligami atau beristri lebih dari satu secara khusus diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

---

<sup>57</sup> Atik Wartini, *Poligami: Dari Fikih Hingga Perundang-undangan*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013), 239

Yang dimaksud dengan izin pejabat dalam ketentuan tersebut menurut Pasal 1 huruf b PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PP 10/1983) yaitu :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
4. Pimpinan Lembaga Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Pengaturan untuk poligami PNS diatur sangat ketat, hal ini dilakukan karena PNS merupakan cerminan dari institusi negara yang selayaknya menjadi teladan dalam masyarakat. Apabila PNS sengaja melakukan poligami tanpa izin dan tidak dicatatkan maka akan mendapat hukuman disiplin berat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) PP 53 Tahun 2010 yang terdiri dari :

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;